



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5254-5264

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Humas Pemerintah Kota Batam Dalam Penanganan Kasus Rempang

Dzaky Furqon^{1✉}, Tria Patrianti², Yudistira Raden Syahputra³, Muhammad Rifqi⁴,

Muhammad Aby Bagas⁵

(1) FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

(2) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: dzaky@umj.ac.id[✉]

Abstrak

Kasus kerusuhan yang terjadi di wilayah bagian kota Batam, Pulau Rempang menimbulkan sorotan dari di negara Indonesia karena konflik antara pemerintah dan perusahaan dengan masyarakat. Masalah yang terjadi di Pulau Rempang akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah kota Batam. Oleh karena itu peran humas pemerintah kota Batam sangat dibutuhkan untuk mempertahankan citra baik pemerintah kota Batam dan menetralkan problematika yang terjadi di masyarakat Pulau Rempang. Selain itu peran media juga sangat diperlukan agar tidak terjadi di media yang akhirnya terjadi penyelewengan informasi. Peran humas pemerintah kota Batam dalam menangani masalah di Kepulauan Rempang ini menjadi tugas penting untuk menyelesaikan kasus pembangunan Rempang Eco City. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran humas pemerintah kota Batam untuk menyelesaikan masalah di Kepulauan Rempang. Metode penelitian ini menggunakan Kajian Literatur dengan Pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik analisis framing melalui pengamatan dari jurnal, media sosial, serta media massa.

Kata Kunci : *Citra, issue, Humas Pemerintah, Rempang*

Abstract

The case of riots that occurred in the Batam city area, Rempang Island, raised the spotlight in Indonesia because of the conflict between the government, companies and the community. The problems that occurred on Rempang Island will create a bad image for the Batam city government. Therefore, the role of public relations for the Batam City government is very much needed to maintain the good image of the Batam City government and neutralize the problems that occur in the Rempang Island community. Apart from that, the role of the media is also very necessary so that this does not happen in the media which results in misappropriation of information. The role of Batam city government public relations in dealing with problems on the Rempang Islands is an important task to resolve the case for the development of Rempang Eco City. Therefore, the aim of this research is to find out the role of Batam city government public relations in solving problems in the Rempang Islands. This research method uses a literature review with a qualitative approach. Data collection techniques use framing analysis techniques through observations from journals, social media and online news.

Keywords: *Image, issue, Government Public Relations, Rempang*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan karena krusialnya permasalahan di pulau Rempang yang terletak di Batam. Pasalnya, kasus ini telah menjadi perhatian nasional yang belum selesai dari puluhan tahun lamanya. Konflik yang terjadi pada pulau Rempang harus di telusuri dan di teliti supaya bisa mendapatkan progress hasil dari kasus itu sendiri. Pasalnya negara Indonesia khususnya hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan rasional agar tidak ada pihak yang di lindungi karena ketidak jelasan hukum yang ada. Tentunya dalam hal ini, pemerintah kota Batam Kepulauan Riau harus menjadi penengah dan pengendali dari citra pulau Rempang yang bermasalah agar reputasi pemerintah setempat tidak semakin turun dan tidak adanya kepercayaan dari warga setempat. Bahkan jika hal ini tidak terselesaikan, maka dikhawatirkan pemerintah setempat tidak bisa membuat kebijakan yang progresif bagi wilayah setempat atas reputasi yang buruk. Tentunya pemerintah harus menjalin hubungan baik dengan stakeholder yang terkait agar terjadi pola regulasi komunikasi yang tepat sehingga tidak menjadi Keputusan dan kepentingan yang sepihak juga merugikan pihak lain. Kasus ini harus di atasi bersama tentu dengan bantuan media yang ada, karena jika tidak karena bantuan salah satunya media maka khalayak tidak akan tau tentang perkembangan kasus ini, Kasus ini harus bisa menjadi informasi public yang terbuka baik dari segi motif status, perkembangan kasus, pelaku, dan hasil progress yang telah di lakukan oleh pemerintah setempat. Pihak pemerintah memang harus menangani dengan serius kasus ini agar tidak menjadi besar, terutama humas pemerintah Rempang juga harus turut andil

dalam mengendalikan kasus ini agar secara perlahan kasus ini bisa di Kelola supaya tidak semakin parah dimata public.

Tentunya Konflik yang terjadi pada kepulauan Riau saat ini menjadi perhatian penting. Konflik di pulau Rempang ini adalah kasus Pembangunan fasilitas Eco city yang di usung oleh pemerintahan dan Perusahaan swasta (Irawan et al., 2021). Proyek Eco City dikerjakan oleh Pt. Artha Graha Group pimpinan Tomy Winata. Konflik di pulau Rempang sudah terjadi awalnya sejak puluhan tahun silam yang sebelumnya Kawasan tersebut sudah di huni oleh Masyarakat local dan pendatang. Namun, Masyarakat di sana belum memiliki sertifikat tanah yang resmi. Sebab tanah itu di miliki oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LKHK). Sedangkan BP Batam mulai terbentuk pada Oktober 1971 yang diinisiasi oleh BJ Habibie sesuai Keppres No. 41 Tahun 1973 (Yudistira & Chaerudin). Kasus Rempang ini bermula pada tahun 2001 yang dimulai oleh pemerintah pusat dan BP Batam dengan menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan Pt. Makmur Elok Graha. Hal ini yang membuat kasus ini makin pelik karena hak kepemilikan tanah yang secara tidak langsung di alihkan oleh Pihak ke 3. Hal ini tentu menjadi tekanan bagi Masyarakat atau penduduk yang tinggal di wilayah Rempang karena mendapatkan ancaman akan status tanahnya yang di atur oleh pihak swasta. Masyarakat yang merasakan keresahan akan masalah tersebut salah satunya adalah nelayan karena kesusahan terkait status kepemilikan tanahnya yang tidak jelas. Konflik lahan tersebut memang belum bisa muncul karena perusahaan penerima HPL tersebut belum masuk dan berkuasa penuh untuk mengelola lahan yang ada di rempang tersebut (Yudistira & Chaerudin, n.d.). Kemudian pada tahun 2022 ketika investor masuk untuk menguasai wilayah Rempang ini, maka mulailah rencana untuk melakukan proyek ambisius yang Bernama Rempang Eco City. Kawasan tersebut berisi tempat Industri, tempat Perdagangan dan tempat wisata yang terintegrasi. Kawasan tersesbut sengaja di buat untuk menaikan daya saing antar negara negara lainnya diantaranya Singapura dan Malaysia. Selanjutnya Proyek ini mulai masuk pada tahun 2023 ini dalam Program Strategi Nasional 2023. Pembangunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 28 Agustus dengan nilai Investasi diperkirakan sebesar Rp. 381 Triliun. Proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2080 dengan hasil bisa memberikan perubahan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut khususnya di wilayah Kepulauan Batam dan sekitarnya. Seperti hal nya Organisasi komunikasi memerlukan pertemuan interpersonal vertical, presentasi, laporan, dan pengalaman. Organisasi pada umumnya adalah berkaitan dengan fungsi organisasi, termasuk iklim, aturan dan personel (Islami et al., 2021). Sedangkan Informasi organisasi adalah salah satu cara untuk menjelaskan cara organisasi mengartikan informasi

yang membingungkan atau ambigu. Teori ini memusatkan perhatian dan proses pengaturan anggota – anggota dalam sebuah organisasi untuk mengelola informasi dari pada memperhatikan struktur organisasi itu (Islami et al., 2021).

Permasalahan Rempang ini juga didukung oleh media massa, sehingga terciptanya komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Namun tidak semua media massa membuka respon kepada komunikan untuk melakukan komunikasi dua arah tersebut. Komunikasi massa lah yang menjadi alur dan sumber terciptanya dinamika persoalan yang sebelumnya kecil bisa menjadi besar atau sebaliknya. Komunikasi massa bisa melalui media massa, baik media audio visual maupun cetak. Dalam komunikasi massa selalu melibatkan Lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks (Sofian & Lestari, 2021). Mc Quail (1996) menjelaskan bahwa komunikasi massa memiliki 5 fungsi diantaranya fungsi pengawasan (Surveillance), fungsi penafsiran (interpretation), fungsi keterkaitan (linkage), fungsi penyebaran nilai (transmission of value), dan fungsi hiburan (entertainment). Fungsi pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam melihat arus masalah yang akan atau sedang terjadi di media tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengontrol atau mengawasi pihak terkait dalam mengantisipasi terjadinya masalah yang semakin besar dan menstabilkan serta mengkonfirmasi kepada masing masing pihak terkait Langkah apa yang harus di lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi penafsiran. Dalam fungsi penafsiran ini Masyarakat bisa memberikan arti atau memberi tanggapan kepada berita yang ada di media berdasarkan penafsiran atau maksud masing masing. Dalam hal tersebut sangat penting dilakukan, karena untuk melihat pendapat dari Masyarakat dalam proses menyelesaikan masalah. Karena asumsi atau penafsiran yang ada menjadi referensi dalam menentukan kebijakan. Masyarakat juga bisa memberikan aspirasi, saran atau lainnya di media massa sebagai bentuk Solusi. Fungsi ketiga yaitu fungsi keterkaitan dimana semua pihak bisa menjadi saling keterkaitan dan terhubung dalam media massa. Pastinya suatu kasus memerlukan pihak lain dalam proses penyelesaiannya, maka dari itu media massa bisa menggabungkan pihak terkait agar khalayak tau bahwa pihak mana saja yang sebenarnya terkait dalam masalah ini. Media massa juga bisa memberikan mengkaitkan berita ke pihak lain sebagai bentuk informasi dan alat komunikasi agar terhubung. Proses keterhubungan ini lah yang dinamakan saling keterkaitan. Selanjutnya fungsi ke empat yaitu fungsi penyebaran nilai. Semua berita, semua informasi dan semua kasus pastinya memiliki nilai yang bisa di sebarakan atau di ambil kepada khalayak. Seperti hal nya film yang kita tonton pasti di akhir film terdapat klimak yang menjadi nilai kehidupan untuk kita ambil dan bisa digunakan sehari hari. Namun berbeda dengan hal yang ada di media massa, kita bisa mengambil nilai dari 2 jalur. Jalur

yang pertama adalah penyebaran nilai yang sudah murni dari berita yang ada di media massa itu sendiri tanpa adanya gangguan dari manapun. Artinya adalah media yang merilis berita tersebut sudah bisa dipercaya penuh bahwa berita yang diunggah merupakan berita yang benar tanpa hoax. Hal ini bisa menjadi informasi utuh bagi khalayak dalam melihat dan menilai berita yang sudah ada. Dan kelima adalah fungsi hiburan yang bisa menjadi tempat kamu bersenang senang dalam melakukan interaksi secara online atau sekedar menghilangkan rasa penat.

Selain itu framing model juga sangat berpengaruh di media massa. Pasalnya kasus Rempang ini tidak bisa semua orang melihat dengan langsung progress penyelesaiannya seperti apa. Karena akses yang terbatas dan pengawasan yang cukup ketat di tempat kejadian ditambah lokasi ini berada di kepulauan yang cukup susah untuk di akses. Maka dari itu Masyarakat hanya bisa melihat kasus ini dari media media, berita televisi dan akses online lainnya yang ada. Maka dari itu framing model digunakan untuk mengetahui suatu realitas yang terjadi dilapangan dan Bagaimana cara menafsirkan realitas tersebut dalam sebuah konten. Entman menunjukkan bahwa framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu berita untuk menekan kerangka pikir terhadap suatu peristiwa. Untuk mengetahui framing yang digunakan oleh media, Entman menggambarkan Bagaimana sebuah peristiwa dimaknai oleh wartawan (Sofian & Lestari, 2021).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah Pembangunan Rempang Eco City ini perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hasil dan perkembangan yang terjadi. Karena jika tidak adanya penelitian lebih lanjut, maka ini akan menjadi boomerang atau masalah yang lebih besar khususnya untuk Masyarakat wilayah Rempang. Transparansi dan progress lebih lanjut terkait masalah ini harus segera dikerjakan agar bisa menjadi suatu Keputusan yang bermanfaat untuk Masyarakat dan pihak lain yang terkait. Selain itu juga masih banyak peneliti yang belum mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian padahal masalah ini adalah hal yang baru untuk diatasi secara Bersama sama dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam proses penanganannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah penelitian ini agar bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam proses penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Tanjung,2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata -kata tertulis atau lisan dari orang

orang dan perilaku yang dapat diminati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripkan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan (Arifudin, 2023). Penelitian ini menggunakan metodologi analisis framing. Analisis framing adalah suatu penggambaran untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh. Penonjolan atau penekanan dalam aspek tertentu tersebut akan membuat bagian tertentu saja yang lebih bermakna, mudah diingat, dan mengena dalam pikiran Khalayak. (Sofian & Lestari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ibu kota semakin menjadi perhatian di kalangan pemerintah. Seperti halnya dari segi aspek infrastruktur, ekonomi, pendidikan, teknologi dan lain lain. Hal ini dilakukan untuk mengejar reputasi negara yang tertinggal dari negara yang lainnya. Maka dari itu sejak era pemerintahan Jokowi, fokus infrastruktur juga menjadi fokus republik ini dalam bersaing di kalangan dunia. Dinas Humas Kota Metropolitan Batam berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait peristiwa Rempang. Tanggung jawabnya termasuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat untuk menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap insiden tersebut dan mengklarifikasi pertanyaan yang mungkin timbul. Dengan mengedepankan transparansi dan komunikasi yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan diperkuat. Humas Kota Metropolitan Batam dapat memberikan informasi resmi mengenai tata cara penanganan peristiwa Rempang sebagai inisiatif pengelolaan kesehatan, langkah pengelolaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan Mereka juga dapat menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat dan menjelaskan kebijakan serta tindakan untuk mengatasi situasi tersebut. Metropolitan Batam Pemerintah Kota Metropolitan Batam termasuk Walikota Batam dan berbagai instansi terkait terus melakukan berbagai upaya untuk menangani kejadian Pulau Rempang Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mengembangkan dan memecahkan masalah yang muncul di pulau tersebut Kegiatan yang dilakukan meliputi rapat, rapat koordinasi, dan upaya tanggap cepat situasi darurat di Pulau Rempang Pemerintah Kota Batam pun menegaskan tekadnya untuk memberikan perhatian serius terhadap pengembangan Pulau RempangSelanjutnya, upaya peningkatan kualitas layanan pengaduan Otoritas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak, termasuk peristiwa Pulau Rempang.

Seharusnya kepentingan internal menjadi hal yang harus di prioritaskan dalam masalah ini. Seperti halnya masalah kependudukan Masyarakat setempat yang harus di utamakan dibandingkan dengan masalah proyek Pembangunan ekonomi yang ada. Namun pemerintah setempat lebih mementingkan proyek yang berasal dari eksternal di banding dengan masalah kependudukan yang ada di wilayah setempat. Memang persaingan di di masa yang akan datang akan menjadi tantangan atau peluang yang harus kita hadapi, namun perlu adanya koordinasi melalui komunikasi yang baik secara vertikal atau horizontal ke semua pihak. Sehingga proyek ini bisa dijalankan dengan baik. Masalahnya ada kesalahan pola komunikasi yang berujung konflik besar antara pemerintah dengan warga setempat dimana Masyarakat menganggap bahwa penduduk pulau Rempang akan di pindahkan ke lokasi lain. Hal ini di lakukan karena lokasi penduduk yang ditempati oleh Masyarakat sekitar akan di bangun Pembangunan. Hal ini juga di pertegas oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada acara ROSI di Kompas Tv pada tanggal 2 October 2023 yang menjelaskan bahwa masyarakat akan di pindahkan ke sebuah rumah layak huni. Namun Masyarakat tetap tidak menginginkan hal tersebut karena menurut mereka tempat tinggal mereka adalah identitas yang tidak boleh dirubah dengan keadaan apapun. Menurut Suardi selaku Juru Bicara Adat Rempang pada wawancara tim ROSI di Kompas TV menjelaskan bahwa "kami tidak mau di relokasi, silakan investasi masuk namun jangan sampai permukiman kami di pindahan". Menurut Suardi, hal tersebut belum ada respon baik dari pemerintah pusat. Maka dari itu Menteri bahlil melakukan koordinasi melalui komunikasi antar pribadi dengan menggabungkan 3 tokoh Masyarakat dan hasilnya pun tetap sama yaitu menolak relokasi Masyarakat disana (kompas.tv, 2023).

Sementara itu, dijelaskan dalam website Kepulauan Riau pada acara peluncuran pengembangan Pembangunan BP Rempang yang di selenggarakan di Gedung Ali Wahdana Lantai III Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2023. Gubernur Kepulauan Riau yaitu H. Anshar Ahmad ,S.E., MM mengapresiasi dan setuju terhadap proyek BP Rempang. Sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan Bersama Mentri Perekonomian untuk membuat perekonomian Kepulauan Rempang ini menjadi ekonomi yang maju, maka Gubernur Anshor mendukung dan mendorong proyek keberlanjutan BP Rempang ini. Hal tersebut dirasa karena akan menjadi investasi yang bagus dan bisa memajukan ekonomi sehingga dengan hasil yang diharapkan sesuai maka perekonomian khususnya di dini bisa naik seperti membangun Kawasan hijau, membangun akses perdagangan dunia, dan memberikan tempat kepada warga negara asing untuk bisa tinggal di sini. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Dr. Ir. Airlangga Hartanto, M.B.A., M.M.T., IPU. Menerangkan bahwa dengan perluasan pengembangan

Kawasan BP Rempang bisa juga menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK dan di harapkan Keppres nya segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga menyampaikan bahwa telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan PT. MEG dengan luas tanah 22.000 Ha di wilaya Barat dan 21.000 Ha di wilayah Timur. Beliau juga telah mengajukan proposal permohonan hak pengelolaan pada Kawasan area penggunaan lain sebanyak 15 permohonan, dengan total luas 563,2 Ha kepada Menteri ATR/BPN serta mengajukan permohonan penurunan status hutan yang merupakan Kawasan hutan produksi yang daoat dikonversi seluas 7.572 Ha kepada Menteri LHK dan telah mendapatkan persetujuan.

Di sisi lain, baik masyarakat Pulau Rempang, komunitas, aktivis tak setuju dengan rencana pembangunan itu dikarenakan proyek tersebut mengancam warga Pulau Rempang untuk henggang dari tanah nya sendiri. Hal inilah yang menjadi masalah utama rencana pembangunan proyek tersebut, Karena bagi warga pulau rempang hal tersebut dapat mengancam kehidupan keseharian mereka seperti mata pencaharian, tempat tinggal dan lain lain. Mengutip dari BBC News Indonesia. Sobirin, 43 warga pulau rempang yang berprofesi sebagai Nelayan menyatakan "Nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita harus mulai dari Nol lagi, Nggak tahu tempat kita kerja, enggak akan bisa, malah bisa jadi mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Di sini kan kita sudah tahu di mana tempat udang, tempat gonggong, kita tahu di mana yang ada ikannya" tuturnya. Lebih lanjut Naharuddin seorang kakek warga pulau rempang yang berusia 79 tahun menyatakan "Ke mana kami akan dipindahkan? Sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan. Sudah begitu lama nenek moyang kami, kuburan kuburan masih ada, peninggalan peninggalan nenek moyang kami masih ada" tuturnya saat Unjuk rasa yang digelar masyarakat di depan Kantor BP Batam pun berujung ricuh.

Mendengar pernyataan aspirasi tersebut kepala badan pengusaha Batam, Muhammad Rudi dalam konferensi pers di Batam mengatakan bahwa warga akan direlokasi ke wilayah Dapur Tiga, Sijantung, di lahan seluas 450 hektar. Di situ, Warga dijanjikan akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta. Tak hanya itu Rudi pun menjanjikan "fasilitas yang komprehensif" mencakup pembangunan rumah bernuansa melayu, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, lapangan bola, dermaga dan peningkatkan infrastruktur jalan. Dan juga banyak fasilitas yang ditawarkan lain nya seperti, Listrik permanen, bantuan sewa rumah, uang tunggu, atau rusun untuk warga yang akan direlokasi. Namun hal itu pun tak cukup menggiurkan bagi warga pulau rempang, Pasalnya mereka menolak untuk direlokasi,

Karena mereka tidak mau pergi dari tempat kelahirannya karena sudah hampir dua abad mereka tinggal di pulau Rempang Tanah nenek moyangnya.

Oleh karena itu sangat penting untuk pihak perusahaan, masyarakat pulau Rempang dan terutama pemerintah untuk berdiskusi mencari solusi untuk permasalahan ini. Dengan adanya diskusi secara terbuka maka besar kemungkinan akan menemukan titik terang dan segera berdamai.



Gambar 1. Sumber : mediacenter.batam.go.id

Strategi komunikasi pemerintah melibatkan penggunaan Hubungan Masyarakat (PR) untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan pentingnya informasi tersebut. Dalam kasus peristiwa Pulau Rempang, kegiatan kehumasan menjadi sarana untuk meningkatkan citra pasca peristiwa tersebut. Humas Kota Metropolitan Batam bisa mencari beberapa cara untuk memperbaiki citranya pasca kejadian Rempang diantaranya transparansi. Humas Pemkot menyampaikan informasi yang akurat dan jelas tentang kejadian tersebut. Pemangku kepentingan lainnya dapat memahami situasi aktual dan mengurangi ketidakpastian negatif. Cara kedua juga bisa dengan cara dialog aktif. Humas Pemkot membangun hubungan dengan publik dan pemangku kepentingan lainnya, mendengarkan masukan, dan memberikan dukungan informasi yang diperlukan. Humas Kota Batam juga bisa menggunakan media. Personel Humas harus menggunakan media untuk menyampaikan informasi dan menciptakan persepsi positif terhadap suatu peristiwa. Hal ini dapat dilakukan melalui pers, situs resmi, dan media social. Perlu juga adanya koordinasi, yaitu Humas Pemkot bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat, untuk mengoordinasikan kejadian dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Selain itu juga bisa memberikan pelatihan dan bimbingan. Humas Pemkot memberikan pelatihan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemangku kepentingan seperti anak, guru, dan staf perawat. Dengan

menerapkan cara-cara di atas, kegiatan kehumasan Kota Metropolitan Batam akan membantu dalam penyelesaian konflik dan perbaikan citra pasca peristiwa Pulau Rempang.

Selain memperbaiki citra, humas pemerintah kota juga berperan pada peningkatan citra di masyarakat terlebih pasca terjadinya suatu kasus yang menimpa di dalam wilayahnya. Beberapa strategi kehumasan (humas) yang dilakukan Kota Metropolitan Batam untuk meningkatkan citranya pasca peristiwa Pulau Rempang. Dengan melakukan komunikasi difokuskan pada penyampaian informasi yang akurat dan ringkas kepada masyarakat mengenai kejadian Pulau Rempang, sekaligus memastikan komunikasi dua arah yang efektif untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Humas Pemkot juga menggunakan berbagai saluran media seperti surat kabar, website pemerintah atau situs jejaring sosial untuk menyebarkan kabar baik dan menciptakan citra positif pasca kejadian di Pulau Rempang. Pemerintah Kota Batam juga harus menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan berpartisipasi dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang membantu meningkatkan citranya pasca peristiwa Kota Rempang. Melalui Program CSR, Pemerintah Kota Batam dapat menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan citranya menyusul keterlibatannya dalam peristiwa Kota Rempang. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal, untuk memastikan upaya restorasi dan remediasi citra dilakukan secara kolaboratif. Dialog dan negosiasi merupakan metode non-yudisial untuk menyelesaikan konflik sekaligus membangun hubungan masyarakat yang positif. Dengan menerapkan strategi kehumasan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Batam dapat meningkatkan citra pasca Rempang dan mendapatkan dukungan masyarakat dalam upaya pemulihan.

SIMPULAN

Pola komunikasi Masyarakat perlu di perhatikan. Lebih khusus jika pola komunikasi tersebut harus dilakukan di kalangan pemerintahan. Seperti halnya komunikasi yang harus dibangun oleh humas kota Batam kepada Masyarakat agar bisa menjadi penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat ditengah masalah yang sedang beredar. Pemerintah kota Batam memiliki rencana yang bagus dalam menyejahterakan rakyat dengan membangun Kawasan eco city untuk memutar perekonomian dan mekajuan Indonesia khususnya kota Batam. Namun karena masalah yang kurang terorganisir ditambah pola komunikasi yang tidak maksimal maka terjadilah perselisihan. Namun saat ini pemerintah kota bahkan pusat telah melakukan klarifikasi dan konsolidasi agar tidak terjadi kerusuhan seterusnya. Sampai saat ini, warga yang terkena dampak Pembangunan proyek diberi ganti

oleh pemerintah berupa rumah yang aman lokasinya dari wilayah proyek tersebut. Sampai saat ini masih ada saja perselisihan yang terjadi karena alasan warga pribumi yang tidak ingin pindah karena tanah nenek moyang, namun pemerintah terus menegosiasi untuk menemukan titik baik agar mencapai keadilan antar sesama pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O. (2023). ANALISIS TEORI TAKSONOMI BLOOM PADA PENDIDIKAN DI INDONESIA. In *Jurnal Al-Amar (JAA)* (Vol. 4, Issue 1).
- Kajian, J., Dan, A., Pangan, K., Triani, E., Fahira Nasution, N., & Magello, A. N. (n.d.). *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City*. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- Yudistira, M. A., & Chaerudin, C. (n.d.). PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG TERHADAP PENGUSURAN PROYEK STRATEGIS NEGARA. *JSL Jurnal Socia Logica*, 3(3), 2023.
- bdullah, D. (2016). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(1), 83–103. <http://kbbi.web.id/perintah>,
- Habiba, A. N., Annisa, ;, Melati, A., Nur, ;, Sa'idah, H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. In *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol. 9, Issue 2).
- Irawan, R., Putri, N. A. D., & Nazaki, N. (2021). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN REMPANG CATE KECAMATAN GALANG KOTA BATAM. ... (SOJ) *UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu*
- Islami, A. N., Fridha, M., Palupi, T., & Romadhan, M. I. (2021). *Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di PT. Feva Indonesia*.
- kompas.tv. (2023, September 28). *Konflik Rempang, Gusur Rakyat Adat demi Investasi?* Youtube
- Sofian, A., & Lestari, N. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. *COMMICAST*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.12928/commicast.v2i1.3150>
- EKOBRURIANTO. (2024, January 11). **Wali Kota Rudi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Percontohan di Rempang**. [Mediacenter.Batam.Go.Id](https://www.mediacenter.batam.go.id).